

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan,2001).

Ketimpangan merupakan masalah yang sangat sulit untuk dimusnahkan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan pasti selalu ada, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing wilayah tersebut. Ketimpangan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan slumps (kumuh) di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau

bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.

Perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah (Kuncoro, 2003).

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan

Lampung tidak terlepas dari masalah ketimpangan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antar provinsi yang mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di suatu wilayah, sehingga suatu kewajiban bila pola pembangunan ekonomi antar wilayah belum merata. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akibatnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB perkapita semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita ADHK Menurut Provinsi
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Aceh	22.705	23.099	23.229	23.129	22.525	22.937
Sumut	26.711	28.037	29.339	30.477	31.637	29.240
Riau	71.638	72.396	72.297	72.385	70.761	71.895
Sumbar	22.639	23.744	24.858	25.978	27.044	24.853
Kep. Riau	68.024	70.930	73.743	76.330	78.643	73.534
Jambi	30.857	32.418	34.012	35.876	36.753	33.983
Bengkulu	17.282	18.144	18.919	19.626	20.304	18.855
Sumsel	27.158	28.578	29.657	30.611	31.547	29.510
Kep. Babel	30.212	31.172	32.081	32.860	33.480	31.961
Lampung	20.739	21.795	22.771	23.646	24.580	22.706

Sumber : BPS Indonesia

Tabel 1.1 Menunjukkan tingkat perolehan PDRB perkapita dari sepuluh provinsi di Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai PDRB perkapita antar provinsi belum merata, apabila dilihat pada tabel hanya ada dua provinsi yang memiliki rata-rata PDRB perkapita sangat jauh jaraknya dari provinsi lainnya yaitu propinsi Kepulauan Riau (Rp. 73.534 Ribu) dan Provinsi Riau (Rp. 71.895Ribu). Tingginya PDRB perkapita di provinsi Kepulauan Riau dan Riau disebabkan pendapatan dari sektor migas yang lebih besar karena merupakan provinsi penghasil minyak di Sumatera.

Pemekaran provinsi-provinsi baru sejak tahun 2000an di Sumatera dan desentralisasi diduga sebagai salah satu faktor pendorong ketimpangan antar wilayah semakin melebar. Untuk mencegah agar ketimpangan tidak semakin melebar diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengelolah penerimaan yang bersumber dari potensi masing-masing daerahnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran penting sebagai tolak ukur dari pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Arsyad (2010) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang yaitu Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

Selanjutnya upah minimum yang merupakan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak. Menurut teori Arthur Lewis daerah perkotaan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pada daerah pedesaan, sehingga akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah pedesaan terus berpindah ke daerah perkotaan. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak dan juga tingkat upah yang lebih tinggi di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2011-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera?

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah atau Instansi Tertentu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan serta pemeratan pembangunan khususnya untuk provinsi di Kawasan Pulau Sumatera.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel. Data panel yaitu gabungan dari data kurun waktu (*time series*) mulai dari periode 2011-2015 dan data silang wilayah (*cross section*) yang meliputi 10 Provinsi di Kawasan Pulau Sumatera. Data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi BPS serta literatur-liteltatur lainnya yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

a. Indeks Williamson

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Sumatera di ukur dengan menggunakan Indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang disebut Indeks Ketimpangan Williamson.

Rumus Indek Williamson sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten ke-i

Y = PDRB perkapita provinsi ke-i

f_i = Jumlah penduduk kabupaten ke-i

n = Jumlah penduduk provinsi ke-i

Semakin besar IW maka semakin besar ketimpangan, sebaliknya jika IW semakin kecil maka tingkat pemerataan semakin membaik. Nilai $IW < 0,3$ berarti tingkat ketimpangan rendah, IW antara 0,3 - 0,5 termasuk kategori sedang, kemudian ketimpangan dikatakan tinggi jika $IW > 0.5$. (Kuncoro,2004)

b. Regresi Panel Least Square (PLS)

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi panel least square (PLS). Spesifikasi model ketimpangan pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, inflasi, dan upah minimum provinsi.

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$IW_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 INDF_{it} + \beta_3 UMR_{it} + u \quad ^1)$$

Keterangan :

IW	= Indeks Williamson Provinsi di Pulau Sumatera (%)
PAD	= Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Sumatera (Rp)
INF	= Inflasi Provinsi di Pulau Sumatera (%)
UMR	= Upah Minimum Regional di Pulau Sumatera (Rp)
α	= Intersep atau Konstanta
$\beta_{1, 2, 3}$	= Koefisien Variabel Bebas
u	= Variabel Gangguan / Terms of error
i	= Data <i>Cross Section</i> Provinsi di Pulau Sumatera
t	= Data <i>Time Series</i> Tahun 2011-2015

¹⁾Sumber : Modifikasi dari Replikasi Penelitian oleh Dhyatmika K. W & Atmanti H. D. (2013) yang berjudul “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*”. Ejournal S1 Undip. Vol. 2, No. 2.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Merupakan uraian tentang variabel penelitian dari definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, berdasarkan nilai indeks Williamson dan hasil analisis keterkaitan variabel berdasarkan Model regresi data panel.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan.

Daftar Pustaka

Lampiran